

Strategi Kebijakan Pengembangan Konsep Sektor Kemaritiman di Indonesia

Rumzi Samin¹ , Muhammad Zulkamirullah¹ 

¹ Magister Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History

Submitted: 4 April 2023

Revised: 24 May 2023

Accepted: 10 June 2023

Available online: 30 June 2023

Correspondence

Rumzi Samin

Email: rumzisamin@umrah.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengembangkan sektor kemaritiman serta efektivitas dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa sektor kemaritiman memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu sektor ekonomi yang strategis bagi Indonesia. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan penting yang harus dihadapi dalam mengembangkan sektor ini, di antaranya adalah masalah infrastruktur, regulasi, dan pengelolaan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan konsep dan gagasan kemaritiman yang mengedepankan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, penguatan kawasan masyarakat maritim, serta peningkatan kerjasama internasional. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan model implementasi kebijakan pengembangan kemaritiman yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, serta peningkatan investasi domestik dan asing. Dalam melaksanakan kebijakan ini, diperlukan sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan pengusaha.

Keywords: Strategi; Kebijakan; Kemaritiman; Indonesia

Pendahuluan

Sejarah kemaritiman Indonesia sangatlah kaya dan panjang. Sebagai negeri kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang begitu besar (Saputra, 2018). Sejarah kemaritiman Indonesia bermula dari peradaban maritim yang pernah ada di Indonesia sejak zaman prasejarah. Pada abad ke-7 Masehi, Kaum Sailendra menjadi kekuatan maritim di wilayah Asia Tenggara dan mampu membangun kerjasama dengan negara-negara lainnya seperti Tiongkok dan India (Marzuqi, 2018). Pada abad ke-13, Kerajaan Singasari dan seterusnya Kerajaan Majapahit menjadi kekuatan maritim di Nusantara dengan menciptakan hilirisasi perdagangan bahari (Limbong, 2015). Ketika bangsa Eropa mulai mendominasi perdagangan dunia di akhir abad ke-15, Indonesia menjadi sasaran utama ekspansi bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam mencari rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya di wilayah Indonesia.

Sejak itu, Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan mulai dikenal dunia sebagai Nusantara. Belanda menjadi kekuatan paling dominan di Indonesia dan menguasai seluruh pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara hingga terjadinya perjuangan Indonesia melawan penjajahan pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia kembali memperkuat sektor kemaritiman dengan membentuk TNI Angkatan Laut pada tahun 1945 dan juga dibentuknya organisasi dunia maritim yang bernama Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 1946 (Perkasa, 2015). Dalam perjalanan waktu,

Indonesia terus mengembangkan sektor kemaritiman yang diintegrasikan secara luas dengan pembangunan ekonomi, budaya, dan sosial di Indonesia. Sejak tahun 2014, Indonesia memasukkan maritim ke dalam program prioritas reformasi struktural nasional, sebagai bagian dari strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Hammervoll et al., 2014).

Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan konsep yang mencerminkan potensi geografis Indonesia sebagai negara yang berada di antara dua benua dan dua samudera, serta memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai yang panjang. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan dan transportasi laut yang menghubungkan berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah seperti ikan, gas, dan minyak bumi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi maritim nasional (Djalal, 2013; Pangemanan, 2019).

Dalam hal ini, Indonesia telah mengeluarkan program strategis yaitu Global Maritime Fulcrum (GMF) yang bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai poros maritim dunia dan fokus pada pengembangan sektor maritim dan pelayaran nasional. Program ini meliputi pembangunan kapal, industri maritim, dan pengembangan pelabuhan nasional yang dapat meningkatkan konektivitas dengan negara-negara lain (Centre For Strategic and International Studies, 2014; Wardhana, 2016). Konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia juga melibatkan peran aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dan keamanan maritim di kawasan dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam sektor maritim (Mière, 2014). Dengan demikian, Indonesia mampu membuktikan bahwa negara maritim yang dibumbui dengan kearifan lokalnya dapat memajukan dirinya sebagai negara yang menyumbangkan keberlangsungan kelautan global.

Indonesia memiliki banyak potensi kekayaan dan sumber daya di sektor tersebut namun masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah di sektor kemaritiman Indonesia antara lain kurangnya investasi dan perhatian dari pemerintah, infrastruktur yang kurang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang maritim (Global Busines Guide, 2018; Mulachela, 2022). Selain itu, permasalahan di sektor kemaritiman juga menimbulkan dampak negatif dalam hal ekonomi, lingkungan, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait untuk memperbaiki kondisi di sektor kemaritiman Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan negara (Dilenia, 2019; Saha, 2016).

Nawacita adalah agenda pembangunan jangka pendek dan jangka panjang pemerintah Indonesia yang pertama kali dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Nawacita terdiri dari sembilan prioritas pembangunan yang meliputi (1) memperkuat ekonomi Indonesia, (2) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan SDM, (3) membangun infrastruktur, (4) mempercepat pembangunan daerah-daerah terpencil, (5) meningkatkan kualitas pelayanan publik, (6) mengurangi kemiskinan, (7) mengurangi kesenjangan antara daerah, (8) meningkatkan lingkungan hidup, dan (9) menghadapi tantangan global (Abdullah & Ahmad, 2019; Arif & Kurniawan, 2018). Kemaritiman Indonesia merupakan salah satu aspek dari Nawacita, terutama pada prioritas pembangunan nomor 1 (memperkuat ekonomi Indonesia) dan nomor 8 (meningkatkan lingkungan hidup). Kemaritiman Indonesia mencakup segala hal yang berkaitan dengan laut dan pulau-pulau kecil, seperti sumber daya alam laut, transportasi laut, keamanan maritim, pariwisata maritim, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Nawacita sangat berkaitan dengan Kemaritiman Indonesia karena Nawacita bertujuan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia,

termasuk potensi di sektor kemaritiman. Dalam Nawacita, pemerintah mengusung konsep Pembangunan Berbasis Kelautan dan Perikanan (PBKP) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya laut dan pulau-pulau kecil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Dengan demikian, Nawacita dan Kemaritiman Indonesia saling terkait dan saling mendukung dalam upaya membangun Indonesia menjadi negara maritim yang maju dan sejahtera.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sektor kemaritiman sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin meningkat, maka kebijakan pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia merupakan hal penting untuk dilakukan. Konsep dan gagasan yang matang mengenai pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia dapat membantu pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia akan berjalan secara berkelanjutan dan manfaat yang dihasilkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya. Pendekatan ini biasanya menekankan pada pengumpulan dan analisis data yang mendalam dan terperinci, serta memperhatikan aspek-aspek subjektif seperti nilai, keyakinan, persepsi, dan pengalaman individu yang terlibat dalam fenomena sosial tersebut (Moleong, 2012). Metode penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip logika sebagai alat analisis. Prinsip-prinsip logika yang dapat digunakan dalam metode ini antara lain deduksi, induksi, analogi, generalisasi, kontradiksi, dan sebagainya. Penelitian yang menggunakan metode logika umumnya dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Setelah itu, data tersebut dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip logika untuk mencari sebab-akibat atau hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam penelitian tersebut. Metode penelitian model logika umumnya digunakan dalam penelitian ilmiah dan studi literatur (Galvan & Galvan, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Tantangan Besar Sektor Kemaritiman di Indonesia

Tantangan kemaritiman adalah permasalahan, hambatan atau tantangan yang muncul dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan aktivitas di wilayah laut dan pesisir, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tantangan kemaritiman meliputi berbagai aspek seperti perubahan iklim, pencemaran laut, kegiatan ilegal di laut, serta konflik wilayah dan kepentingan negara-negara yang memandang laut sebagai sumber daya strategis (Devi & Sadad, 2022). Tantangan kemaritiman menjadi fokus utama bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut dan aktivitas maritim yang mencakup berbagai sektor seperti perikanan, transportasi, industri, dan pertahanan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan kemaritiman yang cukup besar di masa yang akan datang, antara lain:

1. Penanganan karang mati: Indonesia memiliki terumbu karang terbesar di dunia, namun terumbu karang tersebut mengalami kerusakan akibat perubahan iklim, pencemaran dan aktivitas manusia. Upaya penanganan karang mati dan upaya pelestarian terumbu karang harus terus dilakukan agar terumbu karang Indonesia tetap lestari.

2. Illegal fishing: Masih maraknya penangkapan ikan secara illegal oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia, menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia baik secara ekonomi dan lingkungan. Maka, penegakan hukum dengan tegas terhadap kapal-kapal ikan ilegal harus terus dilakukan.
3. Perubahan iklim: Perubahan iklim yang semakin ekstrem dapat mempengaruhi kuat arus, gelombang laut dan pasokan air bersih, yang tentu saja akan mempengaruhi sektor kemaritiman Indonesia. Oleh karena itu, upaya mitigasi terhadap perubahan iklim harus diutamakan dalam pembangunan sektor kemaritiman untuk masa depan.
4. Ketergantungan pada ekspor mineral: Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada ekspor mineral, seperti batu bara, gas, dan minyak. Hal ini akan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global terhadap komoditas tersebut. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat sektor non-mineral dalam sektor kemaritiman, seperti pariwisata, perikanan, dan pengolahan hasil laut.
5. Kekurangan Infrastruktur yang memadai: Infrastruktur yang memadai sangat penting bagi sektor kemaritiman. Sudah banyak terjadi insiden kecelakaan laut akibat faktor infrastruktur yang kurang memadai di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah perairan Indonesia.

Itulah beberapa tantangan kemaritiman yang dihadapi Indonesia di masa yang akan datang. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bersinergi untuk mengatasinya agar sektor kemaritiman Indonesia dapat berkembang secara optimal dan lestari.

Konsep dan Gagasan Kemaritiman di Indonesia

Konsep dan gagasan Kemaritiman di Indonesia merupakan suatu upaya pemerintah dalam menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa, meningkatkan pelayaran nasional, serta memperkuat Indonesia sebagai negara maritim. Pada dasarnya, Kemaritiman mengacu pada kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang melibatkan semua sektor dalam pemanfaatan laut dan wilayah perairan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Konsep Kemaritiman sendiri berangkat dari fakta bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kaya sumber daya alam lautnya, namun masih minim pemanfaatan dan pengelolannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memandang penting untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor maritim dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan peran Indonesia sebagai negara maritim, pemerintah Indonesia telah merancang sejumlah program dan kebijakan strategis, di antaranya:

1. Pembangunan pelabuhan laut dan fasilitas maritim lainnya; Pembangunan pelabuhan laut dan fasilitas maritim lainnya adalah pembangunan infrastruktur dan sarana yang berkaitan dengan pelayanan dan aktivitas di sekitar pelabuhan serta fasilitas penting lainnya dalam kapal lainnya di laut, seperti dermaga, jalan masuk, tongkang, gudang, pangkalan minyak, dan lain-lain (Lisbet et al., 2019). Pembangunan pelabuhan dan instalasi maritim ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional pelabuhan, serta mempermudah proses kegiatan pelayaran bagi kapal-kapal dan kargo yang berlabuh maupun berangkat dari pelabuhan tersebut. Selain itu, pembangunan pelabuhan dan fasilitas maritim juga dapat menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi regional dan nasional, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah dan internasional melalui jalur laut.
2. Pengembangan industri kelautan dan perikanan; Pengembangan industri kelautan dan perikanan adalah upaya untuk memperluas dan mengembangkan aktivitas ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk perikanan, serta meningkatkan nilai tambah dari proses produksi hingga distribusi (Hakim, 2013). Pengembangan

industri kelautan dan perikanan juga mencakup pengembangan infrastruktur penangkapan ikan dan budidaya, pengolahan, penyimpanan, pemasaran, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengembangan industri kelautan dan perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

3. Peningkatan pelayaran nasional; Peningkatan pelayaran nasional adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari transportasi laut dalam negeri yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Sujarwanto & Syafril, 2015). Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pelabuhan, peningkatan kualitas armada kapal dan tenaga kerja pelaut, serta dukungan kebijakan yang mendorong investasi dan pertumbuhan industri pelayaran. Dengan peningkatan pelayaran nasional, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia, meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global, serta membuka peluang investasi yang menjanjikan di sektor pelayaran.
4. Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal, termasuk melalui peningkatan investasi di sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, dan energi laut. Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal sangat penting untuk melindungi dan mempertahankan keberlangsungan hidup lingkungan laut, serta memperoleh manfaat ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, dan energi laut (Priyanta, 2021). Beberapa cara untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut secara optimal antara lain:
 - b. Peningkatan investasi di sektor kelautan dan perikanan, termasuk budidaya ikan, pengolahan ikan, dan perdagangan ikan. Investasi juga dapat dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur pelabuhan, kapal dan fasilitas perikanan lainnya.
 - c. Pengembangan pariwisata bahari dengan memperbaiki fasilitas pariwisata di sekitar pantai, pulau dan terumbu karang, serta mempromosikan keunikan wisata bahari yang ada di Indonesia.
 - d. Pemanfaatan energi laut dengan cara memanfaatkan energi pasang surut, gelombang laut, dan energi termal laut untuk menghasilkan listrik.
 - e. Konservasi dan pelestarian lingkungan laut berupa program rehabilitasi terumbu karang, pemantauan kondisi laut dan pengawasan kegiatan perikanan agar tidak merusak lingkungan laut. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut, kita bisa mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan konservasi lingkungan laut dan mewujudkan kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar pantai dan wilayah laut.
5. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk memperkuat peran Indonesia sebagai negara maritim yang memimpin. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk memperkuat peran Indonesia sebagai negara maritim yang memimpin adalah upaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan maritim yang besar dan dapat memimpin di kawasan maritim (Arisandy, 2015). Kerja sama tersebut meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, pertahanan, dan keamanan laut. Indonesia berupaya untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara lain di kawasan maritim dan internasional untuk memperkuat potensi dan keamanan maritim serta menjaga keutuhan wilayah perairan Indonesia. Dengan cara ini, Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai negara maritim yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan maritim.

Dengan konsep Kemaritiman yang kuat, Indonesia berharap bisa memanfaatkan potensi laut dan wilayah perairannya secara lebih baik untuk meningkatkan perekonomian, sumber daya, dan peran Indonesia di dunia internasional. Tidak hanya itu, Kemaritiman juga diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah pesisir dan pedalaman serta mempromosikan kekayaan budaya dan alam Indonesia kepada dunia (Lamidi, 2022).

Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Kemaritiman

Model Implementasi Grindle dilakukan dengan merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kerja berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi (Grindle, 1997). Secara umum, model ini mengacu pada penggunaan teknik dan strategi yang baik untuk mencapai tujuan kemaritiman yang telah ditetapkan (Roe, 2013). Beberapa prinsip penting yang harus diterapkan dalam model ini antara lain:

1. Terlibatnya semua pihak yang terkait: dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan program kerja, harus melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk para pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kepentingan dan aspirasi dari semua pihak dapat terakomodasi. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terlibatnya semua pihak yang terkait dalam pengembangan Kemaritiman di Indonesia sangatlah penting. Baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus saling bekerjasama dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus memastikan kebijakan yang diambil dapat membawa manfaat bagi semua pihak serta memperhatikan aspek keamanan dan lingkungan. Sementara itu, swasta memiliki peran penting sebagai investor dalam pengembangan Kemaritiman dan harus bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan serta memberikan dampak sosial yang positif. Masyarakat juga harus terlibat dalam pengembangan Kemaritiman dengan memperhatikan dan menjaga lingkungan maritim, mendukung pengembangan pariwisata, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di daerah pesisir. Dengan terlibatnya semua pihak yang terkait, diharapkan dapat meningkatkan sektor Kemaritiman di Indonesia sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan lingkungan.
2. Fokus pada hasil: sukses atau tidaknya program kemaritiman harus diukur berdasarkan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus pada hasil harus menjadi prioritas utama dalam mengembangkan kebijakan dan program kerja. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus pada hasil dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Selain itu, diperlukan pula upaya dalam meningkatkan infrastruktur dan teknologi kemaritiman, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor kemaritiman. Melalui fokus pada hasil, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maritim yang maju dan berdaya saing di tingkat internasional.
3. Transparansi dan akuntabilitas: transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengembangkan kebijakan dan program kerja. Dalam model ini, semua proses harus terbuka untuk umum dan dokumen terkait harus tersedia untuk publik. Berdasarkan pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan kemaritiman di Indonesia. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang baik akan mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan

pihak-pihak terkait dalam pengembangan sektor kemaritiman. Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengembangan kemaritiman, dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, serta pengamat dan akademisi. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia. Pemerintah juga harus memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dilakukan di sektor kemaritiman, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya praktik korupsi, penggelapan dana, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kemaritiman, diharapkan sektor ini dapat berkembang lebih optimal, memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat dan negara, serta memberikan kontribusi yang besar dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

4. Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data: keputusan yang tepat dan efektif hanya dapat dicapai jika didukung oleh data yang akurat dan terverifikasi. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data harus menjadi prioritas dalam merumuskan kebijakan dan program kerja. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data sangat penting dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia. Ada beberapa alasan yang membuat hal ini penting, antara lain:
 - a. Data yang akurat dan terpercaya akan membantu dalam mendukung keputusan yang tepat dan efektif. Dalam pengembangan kemaritiman, data dapat membantu dalam menentukan strategi terbaik, mengidentifikasi peluang baru, dan mengukur kinerja serta efektivitas program atau kebijakan yang diterapkan.
 - b. Dengan adanya data yang akurat, akan mudah bagi pemerintah, pemangku kepentingan, atau investor untuk mengidentifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
 - c. Pengambilan keputusan yang berbasis data juga akan membantu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di dalam pemerintahan. Dengan adanya data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, maka keputusan yang dibuat akan lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - d. Pengambilan keputusan yang berbasis data akan meminimalkan risiko kesalahan atau kegagalan dalam pengembangan kemaritiman. Data yang akurat dapat membantu mengidentifikasi risiko dan meminimalkan kerugian dalam pengembangan proyek atau program yang telah dicanangkan.

Dalam keseluruhan, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data sangat penting dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, meminimalkan risiko kesalahan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas data dan penggunaannya dalam pengambilan keputusan. Dengan menerapkan model implementasi Grindle dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia, diharapkan program dan kebijakan yang dikembangkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, model ini juga dapat memastikan bahwa semua pihak terlibat dan keputusan yang diambil didukung oleh data yang akurat dan transparan. Hal ini akan membantu mempercepat pembangunan kemaritiman di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pesisir dan laut.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Kebijakan ini mencakup beberapa gagasan dan konsep, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem logistik, pengembangan infrastruktur, peningkatan produksi maritim, pengembangan sektor pariwisata, serta peningkatan keamanan dan keselamatan di laut. Pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan ini. Namun, untuk mewujudkan kebijakan ini, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan anggaran, kebijakan yang belum terkoordinasi dengan baik, serta kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor kemaritiman. Pemerintah perlu terus memperbaiki kebijakan dan program yang telah dijalankan sebelumnya, serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam mewujudkan tujuan pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia.

How to cite:

Samir, R. & Zulkamirullah, M. (2023). Strategi Kebijakan Pengembangan Konsep Sektor Kemaritiman di Indonesia. *Public & Social Review*, 3(1), pp. 12-20.

References

- Abdullah, K., & Zaki Ahmad, M. (2019). Maritime border security and challenges for Indonesia. *Malaysian Journal of Society and Space*, 15(2), 155–165. <https://doi.org/10.17576/geo-2019-1502-12>
- Arif, M., & Kurniawan, Y. (2018). Strategic Culture and Indonesian Maritime Security. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 5(1), 77–89. <https://doi.org/10.1002/APP5.203>
- Arisandy, Y. (2015). *Indonesia dorong kerja sama maritim di ASEAN*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/476879/indonesia-dorong-kerja-sama-maritim-di-asean>
- Centre For Strategic and International Studies. (2014). *Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek*.
- Devi, S., & Sadad, A. (2022). Monitoring Harga Kebutuhan Pokok selama Pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru. *Policy and Social Review*, 2(1), 16-22.
- Dilenia, I. dkk. (2019). *Sejarah dan Politik Maritim Indonesia*. Amafrad Press. <https://en.id1lib.org/book/17428966/ce6a4b>
- Djalal, H. (2013). Indonesia's maritime challenges and priorities. In *Maritime Challenges and Priorities in Asia* (pp. 77–87). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203116272-13>
- Galvan, J. L., & Galvan, M. C. (2017). *Writing literatur reviews : A guide for student of the social and behavior sciences* (7th ed.). Routledge.
- Global Busines Guide. (2018). *Indonesia's Maritime Infrastructure | GBG*. Gbg Indonesia. http://www.gbgindonesia.com/en/services/article/2018/indonesia_s_maritime_infrastructure_key_challenges_remain_11873.php
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government : capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development, Harvard University.

- Hakim, M. F. (2013). Blue Economy Pesisir berbasis Kelautan dan Perikanan. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 1–7. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Hammervoll, T., Halse, L. L., & Engelseth, P. (2014). The role of clusters in global maritime value. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 44(1), 98–112. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-11-2012-0335/FULL/XML>
- Lamidi, L. (2022). The Importance of Public Participation in Performance-Based Budgeting in Indonesia. *Policy and Social Review*, 2(1), 37-43.
- Limbong, B. (2015). *Poros Maritim*. Margaretha Pustaka. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1059159>
- Lisbet, L., Pujatanti, A., & Roza, R. (2019). *Diplomasi indonesia dan pembangunan konektivitas maritim*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marzuqi, A., M. (2018). *Maritim sejak Dulu*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/weekend/144810/maritim-sejak-dulu>
- Mière, C. Le. (2014). Defining maritime diplomacy. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges (Cass Series: Naval Policy and History)*, 6–29.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodelogi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulachela, H. (2022). *Negara Maritim adalah Kawasan Mayoritas Perairan*. Katadata. <https://katadata.co.id/intan/berita/620539444715c/negara-maritim-adalah-kawasan-mayoritas-perairan-ini-penjelasan>
- Pangemanan, A. E. (2019). Kebijakan maritim dalam mewujudkan negara kesatuan republik indonesia sebagai poros maritim dunia. *Le Et Societatis*, 7(12), 5–14.
- Perkasa, S. (2015). *Riwayat Maritim Indonesia*. Medcom. <https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/ybJzy28b-riwayat-maritim-indonesia>
- Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 20–39. <https://doi.org/10.25072/JWY.V5I1.361>
- Roe, M. (2013). Maritime governance and policy-making. In *Maritime Governance and Policy-Making* (Vol. 9781447141532). Springer-Verlag London Ltd. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4153-2>
- Saha, P. (2016). Indonesia's potential as a maritime power. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 12(2), 28–41. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1232951>
- Saputra, A. (2018). *Kemaritiman Indonesia*. <https://www.slideshare.net/adinsaputra1/kemaritiman-indonesia-120268812>
- Sujarwanto, S., & Syafril, S. (2015). Pengembangan Pelayaran Perintis pada Perintis Pulau-Pulau Terisolir di Kepulauan Riau. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 17(2), 43–53. <https://doi.org/10.25104/TRANSLA.V17I2.1411>
- Wardhana, W. (2016). Poros maritim dalam kerangka sejarah maritim dan ekonomi pertahanan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(3).